

## **Nasib Sekolah Inpres di Kecamatan Lubuk Basung pada Masa Transisi Orde Baru**

**Razet Eka Putra<sup>1(\*)</sup>, Siti Fatimah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

\*ekaputrarazet@gmail.com

### **Abstract**

*This research is a historical study of education regarding the fate of the Presidential School in Lubuk Basung sub-district after the New Order. The purpose of this research is to describe the condition of education during the New Order era and to describe the education of the Presidential School in Lubuk Basung District. This study uses the historical method of the process: heuristics, data collection, then the process of source criticism and data interpretation. The final stage is writing history so that this research can be completed. The results of this study indicate that the fate of the Presidential School in Lubuk Basung Subdistrict during the New Order Transition Period, namely, firstly, the condition of education in Lubuk Basung District, especially Inpres School in 1979-1990s, the number of elementary school students increased every year, but in 1994 the number of students was getting smaller. Second, the large number of elementary school graduates has an impact at the junior and senior high school education levels where there is an additional construction of SMP and SMA buildings located in Lubuk Basung District. the three Inpres Schools in 1994 changed their names to Public Elementary Schools. Fourth, there are several reasons for changing the name of the Inpres School to a Public Elementary School including: the smaller number of students, the relocation of the capital of Agam Regency to Lubuk Basung, the construction of the Manggopoh Pasaman highway, the lack of government assistance because at that time the government was facing political, economic and other conditions. – other. The five Post-New Order Inpres Schools no longer exist in Lubuk Basung District.*  
**Keywords:** *Inpres School, Education Policy, Lubuk Basung District, New Order.*

### **Abstrak**

Penelitian ini merupakan kajian sejarah pendidikan mengenai nasib Sekolah Inpres di kecamatan Lubuk Basung pasca Orde Baru. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kondisi pendidikan pada masa Orde Baru dan mendeskripsikan pendidikan Sekolah Inpres di Kecamatan Lubuk Basung. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dari proses: heuristik, pengumpulan data, kemudian proses kritik sumber dan intrepetasi data, tahap akhir adalah penulisan sejarah sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nasib Sekolah Inpres di Kecamatan Lubuk Basung Pada Masa Transisi Orde Baru yaitu, pertama kondisi pendidikan di Kecamatan Lubuk Basung Khususnya Sekolah Inpres pada tahun 1979-1990an jumlah siswa SD meningkat setiap tahunnya, namun pada tahun1994 jumlah siswa semakin sedikit. Kedua dengan banyaknya jumlah tamatan SD memberikan dampak di jenjang pendidikan SMP maupun SMA dimana adanya penambahan pembangunan gedung SMP dan SMA yang berada di Kecamatan Lubuk Basung. ketiga Sekolah Inpres pada tahun 1994 berganti nama menjadi Sekolah Dasar Negeri. keempat ada beberapa penyebab berganti namanya Sekolah Inpres menjadi Sekolah Dasar Negeri

diantaranya: semakin sedikitnya jumlah murid, pindahnya Ibukota Kabupaten Agam ke Lubuk Basung, dibangunnya jalan raya manggopoh Pasaman, kurangnya bantuan Pemerintah karena pada saat itu pemerintah sedang menghadapi ksisis Politik, Ekonomi, dan lain-lain.. kelima Pasca Orde Baru Sekolah Inpres tidak ada lagi di Kecamatan Lubuk Basung.

**Kata Kunci:** Sekolah Inpres, Kebijakan Pendidikan, Kecamatan Lubuk Basung, Orde Baru.

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan suatu proses perubahan sikap dan perilaku seseorang maupun kelompok melalui usaha dengan cara pembelajaran mendidik dan pelatihan. Salah satu jenjang pendidikan adalah pendidikan Sekolah dasar yaitu anak-anak yang berumur 7-12 tahun. Pada masa Pemerintahan Soeharto kebijakan di bidang Pendidikan menjadi perhatian utama pada saat itu. Kebijakan pendidikan merupakan suatu keputusan sebagai acuan bertindak baik umum maupun khusus, yang bersifat sederhana maupun kompleks, dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, dan rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan.

kebijakan pendidikan yang dibuat pemerintah Orde Baru adalah program pemberantasan buta huruf dengan dikeluarkannya Intstruksi Presiden No 6 tahun 1975 tentang program bantuan pembangunan gedung Sekolah Inpres (Gunawan, 1986). Dengan didirikannya Sekolah Inpres ini diharapkan mampu mengatasi buta huruf khususnya di daerah Lubuk Basung. Namun dalam pelaksanaannya Sekolah Inpres dari tahun ke tahun mengalami kendala seperti masih kurangnya fasilitas, guru, dan lain-lain. Kemudian jumlah siswa SD Inpres terus mengalami penurunan yaitu diakhir tahun 1990an.

Sejumlah karya yang terkait dengan penelitian ini ialah hasil penelitian Rika Ayu Oktavia (2018), membahas tentang bagaimana pelaksanaan SD Inpres yang ada di Kabupaten Bantul. Pada awal didirikannya SD Inpres ini mampu menampung anak-anak usia sekolah dan dari tahun ke tahun jumlah murid semakin bertambah meningkat. Akan tetapi kemudian SD Inpres ini mengalami kemunduran dimana masih banyaknya masyarakat yang tidak mau bersekolah dan ada juga yang putus sekolah karena masyarakat pada saat itu lebih mementikan penghasilan dari pada pendidikan.

Hasil penelitian Sardiman, dkk (2012) yang membahas tentang perbandingan Kebijakan Pendidikan antara 2 orang menteri yang bernama Daoed Joseof dengan Nugroho Notosusanto yang pada masa Orde Baru Kebijakan Pendidikan yang mereka buat memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kebijakan Pendidikan yang mereka buat sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan saat itu.

Hasil penelitian Toto Soeharto (2012) pada masa Orde Baru adanya kebijakan pendidikan terhadap jenjang pendidikan Madrasah. Dimana kebijakan tersebut madrasah itu diawasi dan dikontrol oleh pemerintah. Kebijakan yang dilakukan adalah dengan dilakukannya kebijakan Akreditasi terhadap madrasah-madrasah tersebut, yang tujuannya untuk kepentingan pemerintahan Orde Baru.

Hasil penelitian ini sangat membantu penulis, karena adanya persamaan tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah Orde Baru baik itu dibidang Sosial

Ekonomi, di bidang pendidikan dan lain-lain. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dimana penulis lebih mengfokuskan ke pada nasib sekolah Inpres yang berada di Kecamatan Lubuk Basung. Manfaat penelitian ini yaitu untuk mengetahui nasib Sekolah Inpres di Kecamatan Lubuk Basung pada masa transisi Orde Baru serta mengetahui penyebab berganti namanya Sekolah Inpres menjadi Sekolah Dasar Negeri.

## **METODE**

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Ada empat tahap penulisan sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik, yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara dengan pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti pengambilan data jumlah SD Inpres di Kecamatan Lubuk Basung di Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Agam, Sekolah Dasar Negeri 16 Kampung Parit yang dulunya merupakan SD Inpres di BatuKambing, Sekolah Dasar Negeri 11 Pudung yang dulunya SD Inpres Pudung, Sekolah Dasar Negeri 56 Sikabu yang dulunya SD Inpres Sikabu Lubuk Basung, Sekolah Dasar Negeri 49 Batu Hampar yang dulunya SD Inpres Batu Hampar Lubuk Basung, Alumni SD Inpres, Pejaga Sekolah SD Inpres. Wawancara dilakukan dengan dua yaitu: wawancara berstruktur yakni mempersiapkan pertanyaan sesuai dengan masalah-masalah penelitian, dan wawancara tidak berstruktur yang tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Data sekunder yang penulis gunakan adalah melalui penelitian perpustakaan, dengan cara memahami buku-buku yang relevan serta yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru baik itu kebijakan dibidang sosial ekonomi, pendidikan terutama yang membahas tentang Sekolah Inpres.

Sumber tersebut diperoleh dari perpustakaan Universitas Negeri Padang, perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial, Ruang Baca Jurusan Sejarah, berupa buku-buku yang relevan seperti: buku Sumatera Barat di Panggung Sejarah (1945-1995), buku Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia, buku Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia, dan sumber-sumber lainnya yaitu literatur kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru, dan jurnal-jurnal yang berkaitan.

Tahap kritik sumber, pada tahap ini penulis akan melakukan verifikasi atau kritik data yang penulis dapat baik dari sumber primer maupun sekunder. Dalam hal ini, penulis akan menguji keabsahan tentang sumber yang ditelusuri melalui kritik intern. Tahap interpretasi, pada tahap ini penulis akan melakukan interpretasi atas data-data yang ditemukan di lapangan. Peneliti melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dengan teori disusun fakta-fakta tersebut dalam suatu interpretasi menyeluruh. Tahap historiografi yaitu melaporkan atau memaparkan hasil penelitian tentang nasib sekolah Inpres di Kecamatan Lubuk Basung pasca Orde Baru.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan Pendidikan adalah suatu keputusan yang berisi beberapa tindakan untuk bertindak ke arah yang lebih baik. Tindakan itu harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan pendidikan agar dalam proses penyelenggaraan pendidikan menjadi lancar. Kebijakan pendidikan bertujuan untuk tercapainya pembangunan Nasional yang kemudian akan berdampak kepada masyarakat banyak. Salah satu kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru yaitu dengan dikeluarkannya Inpres tentang pembangunan Gedung Sekolah Dasar (SD) yang dikenal dengan nama Sekolah Inpres.

Sekolah Inpres merupakan salah satu kebijakan unggulan di bidang Pendidikan pada masa Pemerintahan Soeharto dengan dikeluarkannya Inpres Pembangunan gedung Sekolah Dasar. Pembangunan Gedung SD Inpres ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Yang mengawasi pembangunan Sekolah Inpres tersebut adalah BP3 K yaitu badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan kebudayaan.

Faktor yang menghambat perkembangan pendidikan ialah tempat yang tidak mendukung oleh sebab itu adanya Prasarana yang baik mampu menunjang keberhasilan pendidikan. Grafik perkembangan jumlah murid SD tahun 1900-1973 memperlihatkan setiap tahunnya selalu naik, bahkan kenaikannya meningkat tajam (Kemendikbud, 1976, hlm. 53). Jumlah murid tercatat sebanyak sebanyak 10.962.000 murid Sekolah Dasar (Dekdibud, 1986, hlm. 188). Berdasarkan angka tersebut menunjukkan bahwa adanya minat bersekolah yang tinggi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan mendapatkan taraf hidup lebih baik.

Besarnya suntikan dana dari pusat memungkinkan pula pemerintah daerah membangun banyak prasarana ekonomi dan sosial untuk masyarakat hingga ke desa-desa. Membangun sekolah dasar, misalnya. Selama pelita III, masa paling semarak dalam pembangunan Sumatera Barat, sekitar 1500 sekolah dasar (SD) baru dibangun melalui paket dana Inpres. Sehingga, dalam masa ini jumlah SD meningkat luar biasa, dari 2.303 buah tahun 1976 menjadi 3.813 tahun 1984 (Mestika Zed dkk, 1998, hlm. 316).

### **Pembangunan Gedung SD Inpres**

Daerah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam mendapatkan bantuan pembangunan 4 buah SD Inpres diantaranya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Sekolah Inpres Kecamatan Lubuk Basung

No	Nama Sekolah	Nagari	Didirikan	Diresmikan
1	SD Inpres Pudung	Tigo Koto	1979	1986
2.	SD Kampung Caniago, BatuKambing	Tigo Koto	1982	1986
3.	SD Inpres Sikabu, Lubuk Basung	Kampung Pinang	1982	1986
4.	SD Inpres Batu Hampar, Lubuk Basung	Manggopoh	1982	1986

Sumber: BPS Kabupaten Agam Dalam Angka dan wawancara dengan penjaga Sekolah.

Berdasarkan tabel 1 di atas bahwasanya didirikan di 3 Nagari yaitu Nagari Tigo Koto 2 buah, dan masing 1 buah di Kampung Pinang dan Manggopoh. SD Inpres pertama kali didirikan di Pudung pada tahun 1979 kemudian di tahun 1982 di Batu Kambing, Sikabu dan Batu Hampar. Sekolah Inpres tersebut sama-sama diresmikan pada tahun 1986 (Yasman, 2020).

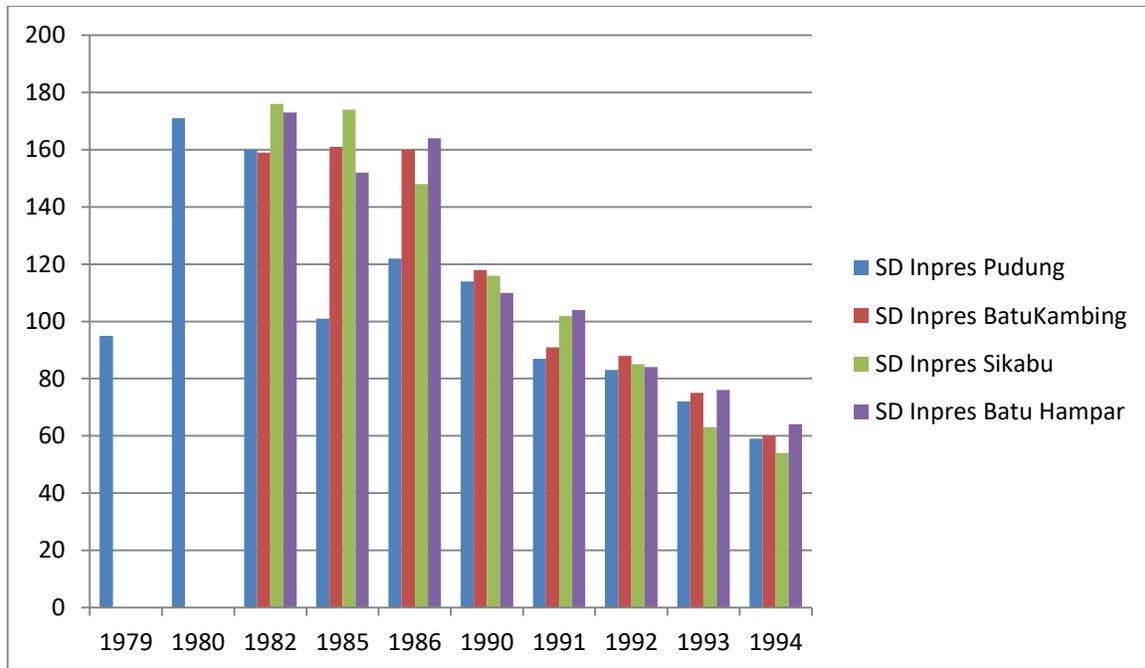
Tabel 2. Jumlah siswa Sekolah Inpres Kecamatan Lubuk Basung dari tahun ke tahun

Sekolah Inpres	Jumlah Siswa									
	Tahun									
	1979	1980	1982	1985	1986	1990	1991	1992	1993	1994
Pudung	95	171	160	101	122	114	87	83	72	59
Kampung Caniago, BatuKambing	-	-	159	161	160	118	91	88	75	60
Sikabu, Lubuk Basung	-	-	176	174	148	116	102	85	63	54
Batu Hampar, Lubuk Basung	-	-	173	152	164	110	104	84	76	64

Sumber : Buku Induk Siswa, hasil wawancara dengan alumni SD Inpres dan Kepala Sekolah.

Berdasarkan tabel di atas dari awal berdirinya Sekolah Inpres di Kecamatan Lubuk Basung menunjukkan dari tahun ke tahun jumlah siswa yang bersekolah di SD Inpres mengalami peningkatan tetapi di akhir tahun 1990 sampai 1994 jumlah siswa Sekolah Inpres mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya program KB yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru, sehingga angka kelahiran penduduk sedikit menurun. Pada saat tahun 1979 sampai awal 1990an jumlah tamatan SD semakin meningkat hal ini kemudian berdampak juga ke jenjang pendidikan SMP dan SMA dimana diadakannya penambahan gedung baru.

Jika data jumlah siswa SD Inpres di Kecamatan Lubuk Basung dari tahun 1979 sampai 1994 dibuat dalam bentuk grafik maka akan terlihat, sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik Jumlah siswa Sekolah Inpres dari tahun 1979-1994

### Sarana Prasarana

Sarana prasarana merupakan sebuah kebutuhan yang digunakan untuk membantu kegiatan pembelajaran. Pada awal didirikannya SD Inpres di kecamatan Lubuk Basung fasilitas masih sangat sedikit. Di SD Inpres Pudung kurangnya papan tulis, meja dan kursi membuat sekolah tersebut melakukan masuk siang dan masuk pagi pada tahun 1979 (wawancara dengan Zulkaini, 2020). Begitu juga dengan SD Inpres di Batu Kambing dimana juga menerapkan masuk siang dan masuk pagi (wawancara dengan Yasman, 2020).

### Kurikulum

Berdasarkan kurikulum 1975 dikatakan bahwa Sekolah Dasar (SD) ialah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan sebagai dasar untuk mempersiapkan siswanya yang dapat maupun tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi (Hamalik, 1990). Kurikulum yang digunakan oleh Sekolah Inpres yaitu sama dengan yang di pakai Sekolah Dasar Negeri (wawancara dengan Melita, 2020).

### Biaya Sekolah

Sekolah Inpres Pudung pada tahun 1979 sampai tahun 1984 tidak memungut biaya sekolah (wawancara dengan Zulkaini, 2020). Begitu juga dengan Sekolah Inpres Lubuk Basung lainnya dimana 5 tahun pertama awal didirikannya SD Inpres tidak dipungut biaya.

Kemudian ditahun berikutnya diadakannya pembayaran SPP dalam bentuk uang hanya setahun sekali. SPP juga dapat diberi keringanan atau kebebasan jika memenuhi syarat yang telah ditentukan seperti siswa yang kurang mampu.

### Tenaga pendidik dan Penjaga Sekolah

Tenaga Pendidik Sekolah Inpres Kecamatan Lubuk Basung guru-guru yang mengajar di Sekolah tersebut hanya sedikit guru yang memiliki ijazah Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Karena banyak guru-guru yang berijazah Sekolah Pendidikan Guru tidak ingin mengajar di Sekolah Inpres dan lebih memilih mengajar di Sekolah Dasar Negeri permasalahannya adalah karena letak sekolah Inpres yaitu di perkampungan dan juga masih belum mendapat aliran listrik. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut kebanyakan dari Sekolah SD Inpres guru-gurunya tamatan dari SMA (Wawancara dengan Salmidawati, 2020).

Penjaga Sekolah SD Inpres diangkat menjadi PNS yang telah dipilih dari keluarga yang mempunyai tanah yang telah dibangun SD Inpres tersebut (wawancara dengan Badrison, 2020).

Tabel 3. Jumlah Guru Sekolah Inpres dari tahun ke tahun

Sekolah Inpres	Jumlah Guru									
	Tahun									
	1979	1980	1982	1985	1986	1990	1991	1992	1993	1994
Pudung	4	9	10	10	10	9	8	7	5	5
Kampung Caniago, BatuKambing	-	-	10	10	10	9	8	6	6	6
Sikabu, Lubuk Basung	-	-	10	9	9	8	8	7	6	6
Batu Hampar, Lubuk Basung	-	-	9	9	10	9	8	6	6	6

Sumber : Hasil Wawancara dengan Penjaga Sekolah, Alumni Sekolah Inpres dan Kepala Sekolah.

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan dari awal berdirinya Sekolah Inpres Jumlah Guru mengalami peningkatan karena banyak siswa yang tamatan SMA mengajar di sekolah Inpres tersebut, khusus di SD Inpres Pudung guru hanya berjumlah 4 orang pada tahun 1979 hal ini dikarenakan pada tahun tersebut hanya 3 kelas yang baru bisa dipakai, selebihnya masih dalam proses pembangunan. Tetapi di akhir tahun 1990an sampai 1994 jumlah guru mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah siswa dan rendahnya

gaji guru. Karena kebanyakan guru-guru di Sekolah Inpres merupakan guru honorer. Rendahnya gaji di Sekolah Inpres dikarenakan pada saat itu pemerintah Orde Baru mengalami krisis di bidang ekonomi, politik, dan lain-lain. Pada pertengahan tahun 1994 bantuan SD Inpres sangat menurun drastis sekitar 5,301 (dalam milyar rupiah), ini berbanding terbalik pada pada pelita III dimana bantuan SD Inpres sangat tinggi sekitar 59.818 (Zed, Mestika; Edy, Utama; dan Hasril, Chaniago, 1998, hlm 317). Semakin sedikitnya bantuan tersebut merupakan suatu kemunduran terhadap Sekolah Inpres.

Setelah berakhirnya Orde Baru Sekolah Inpres di Kecamatan Lubuk Basung sudah tidak ada lagi. Hal ini dikarenakan semua Sekolah Inpres pada tahun 1994 sudah berganti nama menjadi Sekolah Dasar Negeri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan berganti namanya Sekolah Inpres menjadi Sekolah Dasar Negeri yaitu: pertama, kurangnya bantuan dari pemerintah untuk Sekolah Inpres, kedua, pindahnya ibukota Kabupaten Agam yang sebelumnya di Bukittinggi ke Lubuk Basung, ketiga di bangunnya jalan raya yang menyebabkan letak sekolah menjadi strategis yaitu dekat dengan jalan raya dan juga listrik sudah masuk desa, keempat ada kebijakan pemerintah untuk menjadikan semua SD menjadi Sekolah Dasar negeri. Kelima semakin sedikitnya jumlah murid.

## **KESIMPULAN**

Sekolah Inpres adalah kebijakan pemerintah Orde Baru untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Cita-cita tersebut adalah program wajib belajar, program tersebut mewajibkan anak yang berumur 8 tahun memperoleh pendidikan dasar. Sekolah Inpres di bangun di Kecamatan Lubuk Basung. Terdapat 4 buah Sekolah Inpres yang masing-masing berlokasi di Pudung, Batu Kambing, Sikabu, dan Batu Hampar. Sekolah Inpres pada tahun 1979 sampai awal tahun 1990an jumlah muridnya dari tahun ke tahun bertambah banyak hal ini disebabkan karena tingginya angka kelahiran di Lubuk Basung sehingga anak-anak usia sekolah menjadi tinggi. Namun pada tahun 1990 sampai 1994 jumlah murid mengalami penurunan hal ini dikarenakan adanya program KB yang dicanangkan oleh Pemerintah Orde Baru. Permasalahan yang terjadi di Sekolah Inpres yaitu masih kurangnya fasilitas belajar seperti masih kurangnya papan tulis, meja dan kursi, serta guru-guru yang mengajar di Sekolah Inpres kebanyakan tamatan SMA. Pasca Orde Baru Sekolah Inpres di Kecamatan Lubuk Basung sudah berganti nama menjadi Sekolah Dasar Negeri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadi (1987). *Pendidikan dari Masa ke Masa*. Bandung: Armico.
- Badan Pusat Statistik, Kabupaten Agam Dalam Angka. Agam: Bappeda Kabupaten Agam bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik.
- Depdikbud (1986). *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Balai Pustaka.
- Gunawan, Ary H (1986). *Kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Gottchalk, Louis (1986). *Mengerti sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Hamalik, Oemar (1990). *Pengembangan Kurikulum Dasar-Dasar dan Perkembangannya*. Bandung: Mandar Maju
- Intruksi Presiden Republik Indonesia. Nomor 6 tahun 1975 tentang program bantuan pembangunan sekolah dasar 1975/1976.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional (1976). *Pendidikan di Indonesia 1900-1974*. Balai Pustaka
- Rika Ayu Oktavia. (2018). Dinamika SD Inpres di Kabupaten Bantul Tahun 1973-1983, *Jurnal, Ilmu Sejarah*, (3)6, hlm. 790.
- Sadirman, dkk. (2012). Dinamika Pendidikan Pada Masa Orde Baru (Kebijakan Daoed dan Nugroho Notosusanto). *Laporan Penelitian*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Tjahyadi, Nugroho. (1985). *Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia*. Semarang: Yayasan Telapak.
- Suharto, Toto. (2012). Implikasi Kebijakan Pendidikan Era Soeharto Pada Eksistensi Madrasah, *Jurnal Institut Agama Islam (IAIN)*. (52) 3, hlm. 366.
- Zed, Mestika; Edy, Utama; dan Hasril, Chaniago. (1998). *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

**Wawancara:**

- Wawancara dengan Bapak Ambrizal, penjaga sekolah, wawancara, Pudung Ampek Nagari, Minggu 18 Oktober 2020
- Wawancara dengan Bapak Badrison, Penjaga Sekolah, di Sikabu, Rabu 21 oktober 2020.
- Wawancara dengan Ibuk Melita, kepala sekolah SDN 49 Sikabu, wawancara, Sikabu Lubuk Basung, Senin 19 Oktober 2020
- Wawancara dengan Bapak Yasman, penjaga sekolah, wawancara, Batu Kambing, Selasa 20 Oktober 2020
- Wawancara dengan Bapak Zainuar, kepala sekolah SDN 11 Pudung, Wawancara, Pudung Ampek Nagari, Sabtu 17 Oktober 2020
- Wawancara dengan Bapak Zulkaini, alumni atau siswa pertama SD Inpres Pudung, wawancara, Kampung Pisang Ampek Nagari, Minggu 18 Oktober 2020